

# Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau

Sartika Simamora<sup>1</sup>, Arini<sup>2\*</sup>, Faizah Kamilah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Lancang Kuning, Program Studi Akuntansi, Pekanbaru, Riau, 28265, Indonesia  
[arini@unilak.ac.id](mailto:arini@unilak.ac.id), 081378090907

## Abstract

*This study aims to test and determine the Influence of Performance-Based Budget Implementation, Clarity of Budget Targets and Reporting System on Performance Accountability at the Riau Ministry of Law and Human Rights Regional Office. The population in this study was 61 people. Then for sampling, the author used a saturated sampling technique where the entire population was sampled, namely Employees/Officials in the finance section and the General Section at the Correctional and Immigration Technical Implementation Unit and the Riau Ministry of Law and Human Rights Regional Office. This type of research is Quantitative. Data collection techniques used in this study are Questionnaires and Documentation. The research method used in this study is multiple linear regression, with the help of SPSS 26. The results of this study indicate that the Implementation of Performance-Based Budgeting, Clarity of Budget Targets and Reporting System together have an effect on Performance Accountability at the Riau Ministry of Law and Human Rights Regional Office. As shown from the results of the t-test, namely partially Performance-Based Budget has an effect on Performance Accountability with a t-value of  $2.709 > 2.002$  and a significant value of  $0.009 < 0.05$ . Then Clarity of Budget Targets partially has an effect on Performance Accountability with a t-value of  $6.755 > 2.002$  and a significant value of  $0.00 < 0.05$ . Then the Reporting System partially has an effect on Performance Accountability with a t-value of  $2.889 > 2.002$  and a significant value of  $0.005 < 0.05$ . Then from the results of the F Test, namely f count  $91.297 > f$  table value  $2.77$  and with a significance value of  $0.000 < 0.05$ . And has an R Square value of 81.9%, while the remaining 18.1% is influenced by other variables not included in this regression model.*

**Keywords:** Performance Based Budgeting, Clarity of Budget Targets, Reporting System

## 1. Pendahuluan

Akuntabilitas dan transparansi anggaran merupakan suatu dorongan terhadap kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintah yang terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dibutuhkan karena memiliki informasi mengenai pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (UU No.39/2008) tentang Kementerian Negara, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terkait peningkatan kinerja pada kementerian dan transparansi informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu

transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik (Zakiyudin dan Suyanto, 2015).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK). Disamping itu penyusunan LAKIP juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Masih belum terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran dapat berdampak pada penurunan kinerja. Namun dalam Kondisi berikut terlihat dari pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan ditahun 2020 belum tercapai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, seperti Permasalahan di Divisi Administrasi, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham.

Penerpana Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja, (Utami et al., 2018). Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui empat tahap yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja, (Utami et al., 2018).

Sistem penganggaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sudah disusun sesuai proses penganggaran yang berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

**Tabel 1. Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2022 Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Tahun	Nilai IKPA	
	Realisasi	Target
2020	93,97%	95,00%
2021	96,65%	95,00%

2022	98,22%	95,00%
<i>Sumber: LKJIP Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Riau 2020-2022</i>		

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga bahwa presentase penyerapan anggaran paling sedikit 95,00 dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2020 masih belum tercapai dari yang ditargetkan sebesar 95,00%. Namun di tahun 2021 dan 2022 terjadinya peningkatan capaian realisasi anggaran. Hal berikut menjelaskan bahwa pembuatan anggaran belanja daerah belum selaras terhadap aturan yang ada serta menunjukkan beberapa program ataupun kegiatannya belum terwujud, sehingga mengakibatkan satuan kerja sulit mencapai target tersebut.

Kejelasan sasaran anggaran memiliki peran penting dalam membantu aparat pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang cukup dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran-sasaran anggaran yang tidak jelas atau membingungkan akan mengakibatkan ketidakpastian kepada para pelaksananya sehingga berimplikasi pada menurunnya suatu kinerja yang berarti juga menurunnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

**Tabel 2. Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2022 Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Tahun	Nilai IKPA	
	Realisasi	Target
2020	93,97%	95,00%

2021	96,65%	95,00%
2022	98,22%	95,00%

Sumber: LKJIP Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Riau 2020-2022.

Berdasarkan table 2 diatas menunjukkan pencapaian realisasi anggaran setiap tahunnya dari tahun 2020-2022 berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan sub komponen penilaian IKPA, yaitu Revisi DIPA (bobot 10%), Deviasi halaman III DIPA (bobot 10%), Data kontrak (bobot 10%), Penyelesaian tagihan (bobot 10%), Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%), Dispensasi SPM (bobot 10%), Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Capaian output (bobot 25%) menunjukkan bahwa pencapaian pelaksanaan anggaran tahun 2020 Unit Pelaksanaan Masyarakat dan Imigrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau masih belum tercapai sesuai yang ditargetkan sebesar 95,00% yaitu capaian nilai IKPA yang diperoleh sebesar 93,97%. Artinya realisasi anggaran belum sepenuhnya tercapai sehingga anggaran tidak terserap dengan optimal dan kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan kalender kerja.

Dalam pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2020, 2021, dan 2022 ini juga menunjukkan peningkatan kinerja, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program yang dituangkan dalam LAKIP. Dalam LAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau tahun 2020, 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 93,97%, 96,65%, dan 98,22%. Dengan adanya peningkatan presentase ditahun 2020-2021 sebesar 2,68% dan ditahun 2021-2022 sebesar 1,57% hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja setiap tahunnya.

Sistem pelaporan juga diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat

mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan (Sari et al., 2021).

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian/lembaga), yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki empat tahap siklus, yaitu tahap persiapan anggaran (*budget preparation*), tahap ratifikasi (*approval/ratification*), tahap implementasi (*implementation*), tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting dan evaluation*).

### 2.2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan Sasaran Anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas, spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Tujuan dan sasaran anggaran harus disesuaikan dengan lima indikator, yaitu spesifik, terukur, menantang tapi realistis, berorientasi pada hasil akhir, memiliki batas waktu (Pratama et al., 2019). Tujuan dan sasaran anggaran harus disesuaikan dengan lima indikator, yaitu spesifik, terukur, menantang tapi realistis, berorientasi pada hasil akhir, memiliki batas waktu.

### 2.3. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan adalah laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan (Pratama et al., 2019). Indikator sistem pelaporan keuangan adalah akuntabilitas,

manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

**2.3. Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik (Zakiyudin dan Suyanto, 2015). Dalam akuntabilitas kinerja terdapat enam jenis indikator, yaitu indikator masukan (input), indikator proses (process), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcomes), indikator dampak (impact), indikator manfaat (benefit).

**3. Metode Penelitian**

**3.1. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

**3.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja dan Bagian Keuangan dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau yang berjumlah 61 orang.

**3.3. Teknik Pengambilan Sampel**

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh yakni teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014).

**3.4. Jenis Dan Sumber Data**

**3.4.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang dianalisis secara statistik sehingga penelitian menghasilkan hasil data yang relevan.

**3.4.2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu kuesioner/angket yang telah diperoleh dari responden dan menjawab pernyataan-pernyataan yang telah disebarkan oleh peneliti.

**3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Angket/Kuesioner dan dokumentasi.

**3.6. Identifikasi Dan Operasionalisasi Variabel**

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Kinerja, sedangkan variabel independennya yaitu Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pelaporan. Menggunakan skala Likert.

**4. Hasil dan Pembahasan**

**4.1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono;2019;206). Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dari data yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	61	25	50	43.75	4.081
Kejelasan Sasaran Anggaran	61	22	49	42.26	4.270
Sistem Pelaporan	61	14	25	22.10	2.718

Akuntabilitas Kinerja	61	20	50	42.79	4.579
Valid N (listwise)	61				

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2024

Dari table 3 dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui bahwa jumlah data (N) 75. Variabel penerapan anggaran berbasis kinerja diketahui nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum 50 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 43,75 dengan standar deviasi sebesar 4,081. Nilai rata-rata 43,75 menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata jawaban responden tentang penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar 43,75. Menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Variabel kejelasan sasaran anggaran diketahui nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum 49 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,26 dengan standar deviasi sebesar 4,27. Nilai rata-rata 42,26 menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata jawaban responden tentang kejelasan sasaran anggaran sebesar 42,26. Menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya. Variabel sistem pelaporan diketahui nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum 25 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22,149 dengan standar deviasi sebesar 2,718. Nilai rata-rata 22,1 menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata jawaban responden tentang sistem pelaporan sebesar 22,1. Menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya. Variabel Akuntabilitas Kinerja diketahui nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum 50 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42,79 dengan standar deviasi sebesar 4,579. Nilai rata-rata 42,79 menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata jawaban responden tentang akuntabilitas kinerja

sebesar 42,79. Menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

#### 4.1. Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau *r* hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan *r* tabel. Tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali;2018;66). Adapaun hasil pengujian nilai *r* tabel diperoleh dengan persamaan  $N-2 = 61 - 2 = 59 = 0,252$ . Setiap butir pertanyaan dikatakan valid jika *r* hitung > *r* tabel maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai data peneliti. Dari tabel diatas diketahui semua butir pertanyaan valid.

#### 4.2. Uji Reabilitas Data

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan bantuan program SPSS. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali;2021;61). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel. Nilai reabilitas dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X <sub>1</sub> )	0,904	Reliabel
2	Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>2</sub> )	0,904	Reliabel
3	Sistem Pelaporan (X <sub>3</sub> )	0,918	Reliabel
4	Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,923	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2024

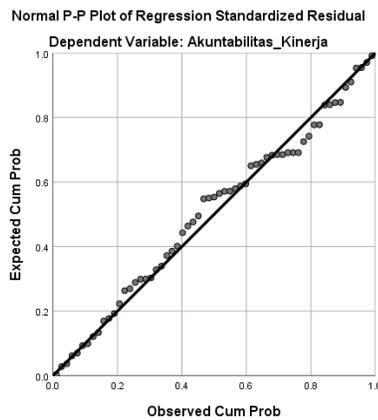
Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa masing-masing nilai *Cronbach Alpha* dari tiap

variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Realiabel.

**4.3. Uji Normalitas Data**

Pengujian terhadap asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang residual datanya berdistribusi normal (Ghozali;2021;196).

**Gambar 1. Hasil Uji Normalitas (P-P Plot)**



Dari hasil gambar 1 didapatkan bahawa data berada didekat garis daigonal yang mengindikasikan data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas juga menggunakan pendekatan uji *statistic One-Sampel Kolmogrov-Smirnov Test*. Jika didapat nilai signifikan > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal secara multivariate (Ghozali;2021;197).

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogrov Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.90063344
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.075
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2024.

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig) untuk persamaan regresi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas data sangat penting untuk meningkatkan objektivitas penilaian dalam sebuah penelitian.

**4.4. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian.

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	0,368	2,716	Tidak terdapat Multikolonieritas
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,411	2,431	Tidak terdapat Multikolonieritas
Sistem Pelaporan	0,642	1,557	Tidak terdapat Multikolonieritas

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai Tollerance variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai besar dari 0,10 dan nilai VIF kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas dalam penelitian ini.

**4.5. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi

korelasi, maka terjadi autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi (Santoso;2018;206). Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi, melalui model tabel *Durbin Waston* yang dapat dilakukan melalui program SPSS, dimana secara umum dapat diambil patokan yaitu (Santoso;2018;207):

1. Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif.
2. Jika angka D-W dibawah +2, berarti autokorelasi negative.
3. Jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada autokorelasi.

**Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Mode	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 <sup>a</sup>	.828	.819	1.950
				1.882

a. Predictors: (Constant), Sistem\_Pelaporan, Kejelasan\_Sasaran\_Anggaran, Penerapan\_Anggaran\_Berbasis\_Kinerja  
 b. Dependent Variable: Akuntabilitas\_Kinerja

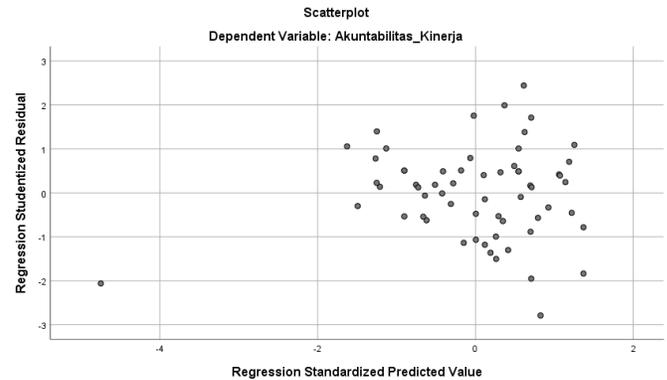
Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan Tabel 7 didapatkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,882 yang berada diantara -2 sampai +2, artinya tidak ada autokorelasi.

**4.6. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain di dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik apabila homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 2 Hasil Uji Heterodeksitas**



Dari gambar 2 didapatkan bahwa data menyebar tidak membentuk pola-pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini tidak terdapat heterodeksitas.

**4.7. Persamaan Regresi Linier Berganda**

**Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-2.886	2.834		-1.018	.313
Penerapan_Anggaran_Berbasis_Kinerja	.275	.102	.245	2.709	.009
Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.621	.092	.579	6.755	.000
Sistem_Pelaporan	.334	.116	.198	2.889	.005

a. Dependent Variable: Akuntabilitas\_Kinerja

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabel 8 yang didapat dari hasil analisis menggunakan SPSS versi 26, maka didapat persamaan regresi linear sederhananya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

$$Y = -2,886 + 0,275X_1 + 0,621X_2 + 0,334X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Kinerja

X<sub>1</sub> : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

X<sub>2</sub> : Kejelasan Sasaran Anggaran  
 X<sub>3</sub> : Sistem Pelaporan  
 e : error

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar (-2,886). Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka akuntabilitas kinerja sebesar (-2,886).
- b. Nilai koefisien regresi variabel penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar 0,275. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai penerapan anggaran berbasis kinerja sebesar satu kali maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja sebesar sebesar 0,275 kali, dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,621. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai kejelasan sasaran anggaran sebesar satu kali maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja sebesar sebesar 0,621 kali, dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Nilai koefisien regresi variabel sistem pelaporan sebesar 0,334. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai sistem pelaporan sebesar satu kali maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja sebesar sebesar 0,334 kali, dengan asumsi variabel lain tetap.

**4.8.Uji F**

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 9. Hasil Uji F**  
 ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1041.485	3	347.162	91.297	.000 <sup>b</sup>
	Residual	216.744	57	3.803		
	Total	1258.230	60			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas\_Kinerja

b. Predictors: (Constant), Sistem\_Pelaporan, Kejelasan\_Sasaran\_Anggaran, Penerapan\_Anggaran\_Berbasis\_Kinerja

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2024.

Tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $f$  hitung  $91,297 >$  nilai  $f$  tabel  $2,77$ . Hal tersebut membuktikan bahwa  $H_4$  diterima. Artinya terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara bersama-sama (simultan) terhadap akuntabilitas kinerja.

**4.9. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R<sup>2</sup>) yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali;2018;147).

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 <sup>a</sup>	.828	.819	1.950

a. Predictors: (Constant), Sistem\_Pelaporan, Kejelasan\_Sasaran\_Anggaran, Penerapan\_Anggaran\_Berbasis\_Kinerja

b. Dependent Variable: Akuntabilitas\_Kinerja

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabel 10 diatas, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,819. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja adalah sebesar 81,9%, sedangkan sisanya 18,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

**5. Kesimpulan dan Saran**

**5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Riau. Setiap instansi Pemerintah perlu memiliki pemahaman yang jelas akan pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja dengan tepat. Pendekatan anggaran dengan basis kinerja berguna sebagai alat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja pemerintah baik dari segi kinerja maupun pencapaian keuangan.

2. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Akuntabilitas di pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konsep pemerintahan yang baik akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar.
3. Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Sistem pelaporan yang baik akan berbanding lurus dengan akuntabilitas kerjanya, karena sistem pelaporan yang baik adalah jika laporan tersebut disusun secara jujur, objektif dan transparan, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan organisasi sektor publik.
4. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Besaran pengaruh variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah adalah sebesar 81,9%.

## 5.2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada topik yang sama, agar

memperluas cakupan penelitiannya, dengan meneliti di beberapa Kantor Wilayah Instansi Pemerintah.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada topik yang sama, agar menambah variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seperti *Good Governance* dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1). 2747-1241.
- Djayasinga, Marselina. 2015. Membedah APBD, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Efendi, R. (2021). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Firdausi, A. N., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. JIRA, 10(8).
- Ghozali, Imam. 2021. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, F. H., Sukmini., dan Rosy, A. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada

- Dinas Pertanian TPH. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*. 4(2). 2775-0833.
- Harianto, D. K., & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir". *Jurnal Aplikasi Akuntansi*. 6(1).
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *JEA*, 4(4), 686-697.
- Illayuniga, R., & Rahayu, Y. (2019). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 2460-0585.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan nomor 258/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Jakarta: Sekretariat Jenderal.
- Kartika, R. D., & Sukamto. (2019). Pengaruh Realisasi Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Efisiensi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Liability*, 1(2), 63–83.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau, 2022, Pekanbaru.
- Maharani, A.U., Malino. M., & Simanjuntak, V., (2022). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Manokwari). *Accounting Research Journal*, 2(2), 147-161.
- Mahmudi, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mahsun, M., 2015. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi 1*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mulyadi, A., & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). 2(2), 95–101.
- Mulya, H.G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192-212.
- Pratama, R., Henri, A., & Salma. T. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. *JEA*, 1 (1), 2656-3649.
- Precelina, D. D., & Wuryani, E. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*.

- Priatna, H., & Nuraisyah, E. (2018). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 9(1), 2086-4159.
- Rahmawati, H., & Arwaty, D. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Daerah, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 17609-17625.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Tentang Kementerian Negara. Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jo. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.
- Republik Indonesia 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran. Jakarta.
- Risandini, T., Prayogo, Y., & Ifazah, L. (2024). Pekaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Pada BPKAD Kabupaten Merangin), *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 196-211.
- Robbins, S., 2017. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Safitri, N. H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Dan Ketaatan Pada Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen). *Jurnal Ekonomi Regional*, 12 (2), 34-49.
- Said, A. L. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, S. 2018. *Menguasai statistik dengan SPSS 25*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Saptarinur, R., Rofingatun & Lamba, R. S. A. (2022). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 5 (2), 84–94.
- Sari, I. M., Intihanah., & Musa, A.A.A.M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. *JAK*, 6 (2), 2088-4656.
- Septiani, S., Defitri, S. Y., & Sukraini, J. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok), 1(3), 83-102.

- Setyanusa, I. B., & Mutmainnah, U. G. (2022). Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bandung). 2 (2), 172–191.
- Sukma, A.T., & Rahma, R.W. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 2(2), 2807-243.
- Umar, B., Rustan, D.M., & Sylvia. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 2(3), 249-260.
- Utami, W., Afrizal, H., & Machpudin, A. (2018). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja*, 2(4), 2460-6235.
- Wardani, N.D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 6(1), 47-56.
- Wibisono, S., & Riharjo. I. B. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*, 5(9), ISSN: 2460-0585.
- Zakiyudin, A. M., & Suyanto, S. (2016). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 89–96. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i01.99>.